

TESIS

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORUPSI TERHADAP PEJABAT
PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DI PEMERINTAH DAERAH
DALAM PERSPEKTIF ASAS KEPASTIAN HUKUM**



Oleh:

**R. Rahmat Dannur
NIM. 2320215310127**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2025**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORUPSI TERHADAP PEJABAT
PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DI PEMERINTAH DAERAH
DALAM PERSPEKTIF ASAS KEPASTIAN HUKUM**

TESIS

**Untuk memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

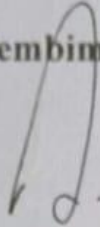
Oleh :

**R. Rahmat Dannur
NIM. 2320215310127**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2025**

**TESIS INI
TELAH DIPERIKSA DAN DISETUJUI
PADA TANGGAL**

Pembimbing



**Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.
NIP. 19761017 2001112 1 002**

**Disahkan oleh
Koordinator
Program Magister Hukum**



**Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 1972 0208 19993 1 004**

**Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



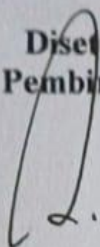
**Dr. Achmad Faihsal, S.H. M.H. |
NIP. 19750615 200312 1 001**

Judul Tesis :

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORUPSI TERHADAP PEJABAT
PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DI PEMERINTAH DAERAH
DALAM PERSPEKTIF ASAS KEPASTIAN HUKUM**

Nama : R. Rahmat Dannur, S.H
NIM : 2320215310127

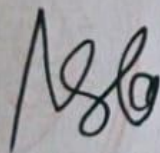
Disetujui,
Pembimbing



Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.
NIP. 19761017 2001112 1 002

Diketahui,

Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 1972 0208 19993 1 004

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

Tanggal Lulus :.....

Tanggal Wisuda :.....

**Tesis ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal 3 Juli 2025**

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Dr. Suprpto, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

Anggota : Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.

MOTTO/ PERSEMBAHAN

Motto:

Al hayyatu ka al tsalji. Istamti' bihaa qobla an tadzuuba
(Hidup itu seperti halnya es, nikmatilah dengan baik sebelum ia mencair)

Walaupun hidup susah, namun Indah Begini adanya
Bukan kah Hidup Ini Indah Bung !
"Integritas adalah benteng terbaik melawan korupsi"

(Penulis)

Persembahan Kepada :

- Orang Tua Tercinta Mama Triwinarsih dan Bapa Setu Arianto, serta Mertua Abah Buchari Muslimin dan Mama Hj. Kuswari yang telah memberikan cinta dan Kasih sayangnya, selalu mendukung setiap Langkah kebaikan untuk anaknya.
- Isteri Tercinta, Rismailina Erliani, S.T yang telah memberikan support dan Motivasi kepada Penulis untuk menuangkan Pemikiran kedalam Tesis.
- Tak Lupa Mba Retna Trisnawati dan Mas M. Satrio N. saudara Penulis yang selalu membimbing penulis.
- Kakak-kakak Ipar Penulis yang juga selalu memberikan semangat.
- Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H. yang selalu memberikan arahan dalam bimbingan, sehingga penulis dapat menuangkan hal yang perlu dan penting dalam Penulisan, sehingga penulis dapat menyempurnakan dan menyelesaikan Tesis ini.
- Para Dosen Fakultas Hukum ULM yang selalu support kepada penulis dari penulis menginjakkan kaki pertama kali Tahun 2012 dan telah menyelesaikan di Tahun 2016 hingga dapat menyambung Pendidikan di Strata 2 pada 2023-2025.
- Keluarga Besar Forum Apresiasi Seni Fakultas Hukum ULM.
- Seluruh Organisasi yang menaungi penulis, Ketua dan Anggota serta Pengurus LBH Intan Martapura, DPC PERADI MARTAPURA-BANJARBARU, PBH PERADI MARTAPURA- BANJARBARU, YOUNG LAWYER COMMITTEE PERADI, IKADIN PERADI MARTAPURA- BANJARBARU. Serta
- Rekan-rekan kawan seperjuangan PMIH 2023 yang menjadi Sahabat berfikir penulis, yang namanya tidak dapat disebutkan satu-persatu, terimakasih untuk semuanya.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : R. Rahmat Dannur
NIM : 2320215310127
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi Hukum : Sistem dan Peradilan Pidana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain , kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka dan bebas dari plagiarism.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 3 Juli 2025

Yang membuat pernyataan



R. Rahmat Dannur
2320215310127

Ucapan Terimakasih

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ...

Bismillahirrahmannirrahim...

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa'Ta Ala, atas berkah, rahmatnya dan karunia yang dilimpahkannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat dan salam tak lupa penulis panjatkan kepada junjungan dan suri tauladan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat.

Dalam penulisan karya ilmiah berupa Tesis ini membahas tentang "Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Terhadap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Di Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Asas Kepastian Hukum", dan penulisan ini bertujuan sebagai riset penulis untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Pasca Sarjana (S-2) pada Program Magister Hukum Universitas lambung Mangkurat.

Penyelesaian Tesis ini, tidak lepas dari motivasi, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada :

- 1. Orang Tua Tercinta Ibu Triwinarsih dan Bapak Setu Arianto, serta Mertua Abah Buchari Muslimin dan Mama Hj. Kuswari yang telah memberikan cinta dan Kasih sayangnya, selalu mendukung setiap Langkah kebaikan untuk anaknya.**
- 2. Isteri Tercinta, Rismailina Erliani, S.T yang telah memberikan support dan Motivasi kepada Penulis untuk menuangkan Pemikiran kedalam Tesis.**
- 3. Tak Lupa Mba Retna Trisnawati dan Mas M. Satrio N. saudara Penulis yang selalu membimbing penulis.**
- 4. Kakak-kakak Ipar Penulis yang juga selalu memberikan semangat.**
- 5. Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H. yang selalu memberikan arahan dalam bimbingan, sehingga penulis dapat menuangkan hal yang perlu dan penting dalam Penulisan, sehingga penulis dapat menyempurnakan dan menyelesaikan Tesis ini.**
- 6. Para Dosen Fakultas Hukum ULM yang selalu support kepada penulis dari penulis menginjakkan kaki pertama kali Tahun 2012 dan telah menyelesaikan di Tahun 2016 hingga dapat menyambung Pendidikan di Strata 2 pada 2023-2025.**
- 7. Keluarga Besar Forum Apresiasi Seni Fakultas Hukum ULM.**

8. **Seluruh Organisasi yang menaungi penulis, Ketua dan Anggota serta Pengurus LBH Intan Martapura, DPC PERADI Martapura-Banjarbaru, PBH PERADI Martapura- Banjarbaru, Young Lawyer Committee PERADI, IKADIN PERADI Martapura- Banjarbaru. Serta**
9. **Rekan-rekan kawan seperjuangan PMIH 2023 yang menjadi Sahabat berfikir penulis, yang namanya tidak dapat disebutkan satu-persatu, terimakasih untuk semuanya.**

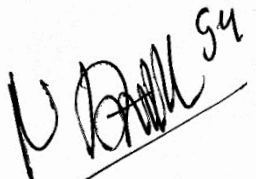
Penulis berharap agar kajian atau riset penulis ini dapat memberikan pemahaman khususnya kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan terdapat Batasan dalam pengadaan barang dan jasa, serta untuk para Aparat Penegak Hukum yang berniat baik untuk mengembalikan kerugian Negara hendaknya tetap mengacu pada Regulasi penindakan secara Administratif guna memberikan kepastian hukum kepada PPTK. Segala kemampuan telah penulis curahkan untuk menyelesaikan Tesis ini, namun mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis sehingga tentunya masih jauh dari kata sempurna, dan hanya Allah Subhanahu Wa'ta ala lah yang maha sempurna. Akhir kata penulis harapkan semoga tesis dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum dan bermanfaat bagi pihak yang termasuk kedalam kerangka berfikir penulis, amin.

Wabillahi taufik wal hidayah

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh..

Banjarbaru, 3 Juli 2024

Penulis



R. Rahmat Dannur

Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat kehadiran Allah Subhanahu Wa'Ta Ala atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya tulis ilmiah yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Terhadap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Pemerintah Daerah dalam Perspektif Asas Kepastian Hukum".

Penulisan ini dilatarbelakangi oleh maraknya tindak pidana korupsi yang melibatkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan pemerintah daerah. Sebagai garda terdepan dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, posisi PPTK sangat rawan disalahgunakan. Ironisnya, seringkali terjadi dilema hukum dalam menentukan batas pertanggungjawaban pidana mereka, terutama saat berhadapan dengan keputusan atasan.

Fokus utama penulisan ini adalah menganalisis bagaimana asas kepastian hukum dapat diterapkan untuk memberikan kejelasan dan keadilan dalam proses hukum. Asas ini menjadi landasan krusial untuk memastikan bahwa setiap tindakan korupsi yang dilakukan oleh PPTK dapat dipertanggungjawabkan secara proporsional, tanpa mengabaikan aspek keadilan dan hak-hak hukumnya.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga karya tulis ini dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Keywords: Pertanggungjawaban; PPTK; Kepastian Hukum

Abstract

Penelitian ini membahas tentang pertanggungjawaban pidana terhadap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang tidak memiliki kewenangan formal dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah, dilihat dari perspektif asas kepastian hukum. Dalam praktiknya, PPTK seringkali dilibatkan dalam proses pengadaan meskipun secara regulasi tidak secara eksplisit diberikan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan peraturan teknis lainnya serta Perpres nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 sebagai pengganti Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan studi kasus yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelibatan PPTK dalam pengadaan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, dan dalam beberapa kasus menyebabkan kriminalisasi yang tidak proporsional terhadap PPTK yang sebenarnya hanya menjalankan tugas administratif atau perintah atasan. Oleh karena itu, diperlukan formulasi hukum yang lebih tegas dalam mengatur batas kewenangan PPTK agar tidak terjadi tumpang tindih tanggung jawab pidana, serta untuk memastikan perlindungan hukum yang adil dalam konteks tata kelola pemerintahan daerah.

Keywords: Accountability; PPTK; Legal Certainty

Abstract

This study discusses criminal accountability for Technical Activity Implementation Officers (PPTK) who do not have formal authority in the procurement of goods and services within local government, from the perspective of the principle of legal certainty. In practice, PPTKs are often involved in the procurement process even though regulations do not explicitly grant them authority as stipulated in Presidential Regulation No. 16 of 2018 and other technical regulations, as well as Presidential Regulation No. 12 of 2021 amending Presidential Regulation No. 16 of 2018, which replaced Presidential Regulation No. 54 of 2010 on the procurement of goods and services. This study uses a normative legal approach by examining relevant legislation, legal theory, and case studies. The results of the study indicate that the involvement of PPTK in procurement can lead to legal uncertainty and, in some cases, result in disproportionate criminalization of PPTK who are merely carrying out administrative tasks or following superior orders. Therefore, a more explicit legal formulation is needed to regulate the scope of authority of PPTK to avoid overlapping criminal liability and to ensure fair legal protection within the context of local government governance.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
MOTTO/ PERSEMBAHAN	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
UCAPAN TERIMAKASIH	
KATA PENGANTAR	
ABSTRAK	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR SINGKATAN/ISTILAH	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Metode Penelitian.....	50
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	55
BAB II PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEJABAT PELAKASANA TEKNIS KEGIATAN, YANG TIDAK BERWENANG DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA PEMERINTAH DAERAH DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM	55
A. Kepastian Hukum Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Terhadap Barang dan Jasa Dalam Menyelesaikan Kerugian Keuangan Negara.....	55
B. Upaya Untuk Mencapai Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Pertanggungjawaban Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam penyelesaian Kerugian Keuangan Negara pada Pengadaan Barang dan Jasa	62
BAB III FORMULASI HUKUM PIDANA KORUPSI TERHADAP PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN YANG TIDAK BERWENANG DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA PEMERINTAH DAERAH DIMASA MENDATANG	98
A. Upaya Hukum Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam kerugian Keuangan Negara pada Pengadaan Barang dan Jasa.....	98
B. Formulasi Hukum terhadap kerugian Negara yang terjadi pada pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan pemerintah daerah yang melibatkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	104
BAB IV PENUTUP	118
A. Kesimpulan.....	118
B. Saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	